

DAMPAK PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL KERTAJATI DALAM KAJIAN *GREEN POLITICAL THEORY*

Bambang Hermanto

Universitas Airlangga, Jawa Timur, Indonesia
bambang.hermanto-2017@fisip.unair.ac.id

ABSTRAK

Salah satu program pembangunan infrastruktur yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah mengembangkan kawasan Kertajati menjadi kawasan bandara dan aero-city. Pembangunan Bandara Internasional Kertajati akan memicu perubahan yang sangat besar bagi masyarakat mengingat keberhasilan pembangunan Bandara Internasional Kertajati berdampak besar bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penggunaan metode analisis media dan studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan berasal dari data primer berupa observasi terhadap fenomena yang terjadi dan data sekunder berupa dokumentasi yang valid. Identifikasi dampak negatif alih fungsi lahan pertanian menjadi Bandara Kertajati dari aspek lingkungan meliputi terganggunya ketersediaan air untuk lahan pertanian dan kebisingan. Pengalihan fungsi lahan pertanian ke Bandara Internasional Kertajati mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan, sehingga berdampak pada pencemaran udara dan kualitas pertanian menjadi lebih buruk. Kebisingan merupakan dampak negatif yang paling dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di dekat Bandara Internasional Kertajati. Dalam pengembangan Bandara Internasional Kertajati, negara harus memberikan kesempatan kepada warga kolektif untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik baik ekosentrisme maupun antropisme (eko-demokrasi). Jangan sampai pembangunan Bandara Internasional Kertajati menimbulkan bencana alam, perubahan iklim, pencemaran udara, dan perusakan lingkungan. Pembangunan Bandara Internasional Kertajati tidak boleh bersifat ekosentrisme, dimana lingkungan alam dimanfaatkan secara maksimal untuk menimbulkan krisis.

Kata Kunci: Dampak Pembangunan, Teori Politik Hijau, Bandara Internasional Kertajati

ABSTRACT

One of the infrastructure development programs that has been launched by the Government of West Java Province is to develop the Kertajati area into an airport and aero-city area. The construction of Kertajati International Airport will trigger a very big change for the community considering the success of the construction of Kertajati International Airport has a major impact on human life and the environment. This study uses a qualitative approach with the use of media analysis methods and literature studies. Data collection techniques used are derived from primary data in the form of observations of phenomena that occur and secondary data in the form of valid documentation Identification of the negative impacts of conversion of agricultural land into Kertajati Airport from environmental aspects, including disruption of water availability for agricultural land and noise. Agricultural land directly adjacent to the location of Kertajati International Airport is experiencing problems related to the disruption of waterways and water sources. Transfer of the function of agricultural land to Kertajati International Airport resulted in a decrease in environmental quality, so the impact on air pollution and quality for agriculture is worse. Noise is the most negative impact felt by people who live close to Kertajati International Airport. In the development of Kertajati International Airport, the state must provide opportunities for the collective citizens to participate in the processes of making public policies both ecocentrism and anthroprism (eco-democracy). Do not let the construction of Kertajati International Airport cause natural disasters, climate change, air pollution, and environmental destruction. The construction of the Kertajati International Airport must not be ecosentrism in nature, where the natural environment is maximally utilized to cause a crisis.

Keywords: *Development Impact, Green Political Theory, Kertajati International Airport*

PENDAHULUAN

Artikel ini akan membahas tentang dampak pembangunan Bandara Internasional Kertajati Dalam Kajian *Green Political Theory*. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan arah pembangunan Jawa Barat yaitu menjadikan masyarakat Jawa Barat yang mandiri, dinamis dan sejahtera. Untuk itu diperlukan kebijakan pembangunan yang akurat, termasuk pengembangan infrastruktur wilayah yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi wilayah, mendukung kelancaran aktivitas sosial ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu program pembangunan infrastruktur yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah mengembangkan Kawasan Kertajati menjadi kawasan bandar udara dan *aerocity*. Untuk itu, maka dari segi perencanaan telah ditetapkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Jawa Barat, serta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Barat. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Barat 2009-2029 dan RTRW Kabupaten Majalengka 2003-2013, pengembangan kawasan Kertajati *Aerocity* telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dengan bandar udara sebagai infrastruktur strategis yang terdapat di dalamnya.

Sejalan dengan hal itu, secara Nasional telah ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional yang menempatkan BIJB Kertajati sebagai Bandar Udara Sekunder di Indonesia.

Pembangunan Bandara Internasional Kertajati diharapkan menjadi simpul transportasi untuk mendukung kegiatan perekonomian masyarakat. Pembangunan Bandara Internasional Kertajati dilihat dari perspektif pembangunan, merupakan

upaya yang dilakukan pemerintah dan atau swasta yang diniatkan “baik” oleh mereka pada satu sisi, dan sisi lain merupakan kreativitas lokal yang melihat adanya kesempatan untuk merealisasikan dunia gagasan/*ideas local*. Meminjam istilah Tania Murray Li seorang Profesor Antropologi dan Ketua Penelitian Senior Kanada bidang Ekonomi dan Budaya Politik di Asia-Pasifik di Universitas Toronto, pembangunan adalah *The Will to Improve*.

Pembangunan Bandara Internasional Kertajati akan memicu timbulnya perubahan yang sangat besar bagi masyarakat. Oleh karena itu dalam pembangunan Bandara Internasional Kertajati perlu juga disertai dengan fasilitasi keinginan masyarakat baik dalam hal relokasi maupun pemberdayaannya, sehingga dapat diperoleh dukungan masyarakat dan manfaat dari kebijakan tersebut.

Suatu kebijakan publik ditujukan untuk memberikan suatu solusi atau pemecahan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Apakah pembangunan Bandara Internasional Kertajati sebagai pengembangan infrastruktur merupakan solusi untuk menjadikan masyarakat Jawa Barat yang mandiri, dinamis dan sejahtera. Bagaimana dampak pembangunan tersebut terhadap lingkungan sekitar. Studi ini penting untuk dilakukan, mengingat keberhasilan pembangunan Bandara Internasional Kertajati memberikan dampak besar terhadap kehidupan manusia dan lingkungan.

METODE PENELITIAN

Artikel ini terdiri dari beberapa tahap yang dimulai dengan tahap pengumpulan data. Kemudian dilanjutkan dengan proses analisis data. Dalam mengamati dampak pembangunan Bandara Internasional

Kertajati, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Melalui metode kualitatif akan menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tertulis mengenai dampak Pembangunan Bandara Internasional Kertajati dalam Kajian *Green Political Theory*.

Teknik pengumpulan data yang digunakan berasal dari data primer yang berupa observasi atas fenomena yang terjadi dan data sekunder yang berupa dokumentasi yang valid. Pengamatan terkait dampak pembangunan Bandara Internasional Kertajati diamati melalui media massa. Dokumentasi dalam bentuk sastra jurnal Nasional dan Internasional.

Validasi data dan temuan yang diperoleh peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Keseluruhan proses analisis data melibatkan beberapa upaya untuk menginterpretasi data dalam bentuk teks atau gambar. Peneliti perlu menyiapkan data yang akan dianalisis untuk memahami dan menginterpretasi makna sebenarnya. Setelah itu, data dianalisis dengan menggunakan teori yang telah ditetapkan.

Green Political Theory

Green political theory atau Teori Politik Hijau melihat bahwa negara bukanlah satu-satunya yang memiliki kekuatan untuk menangani permasalahan lingkungan. Negara haruslah mengambil perannya dengan bekerjasama dengan negara lain untuk menangani isu lingkungan.

Hal tersebut dilakukan karena dampak yang dihasilkan bukan lagi berpengaruh pada satu negara saja namun dapat menyebar ke negara lainnya. *Green theory* sendiri memiliki tujuan yakni melalui kerjasama yang dijalin oleh negara-negara kemudian diharapkan dapat menciptakan

lingkungan yang seimbang dan kesejahteraan makhluk hidup.

Apa yang dimaksud dengan Teori Politik Hijau (*green political theory*)? Secara sederhana, menurut (Apriawan, 2011) Pemikiran Hijau melihat dunia seperti berikut:

1. Kelompok pemikir hijau menuntut perubahan secara radikal pada pola organisasi sosial politik dan adanya penghargaan terhadap spesies non-manusia;
2. Penolakan terhadap pandangan dunia yang *anthropocentric*;
3. Penolakan terhadap strategi pembangunan yang menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai standar kualitas kehidupan;
4. Mereka percaya bahwa karena ulah manusia lah yang telah menciptakan ancaman bagi keberlangsungan umat manusia dan spesies lainnya;
5. Perlu adanya perubahan yang fundamental dalam struktur sosial, ekonomi dan politik serta ideologi dan sistem nilai;
6. Pemisahan yang tegas antara kebutuhan vital dan non-vital;
7. Perlu adanya etika yang didasarkan pada nilai teori hijau yang menempatkan sebuah nilai intrinsik pada kehidupan non-manusia;
8. Perlu adanya komitmen yang pro-aktif untuk perubahan signifikan demi mencapai masa depan lingkungan, termasuk mempromosikan gaya hidup alternative, norma dan nilai serta desentralisasi kekuasaan.

Menurut (Ronald Inglehart, 1977) yang dikutip dari penelitiannya pada level nasional, kehadiran the greens merupakan fenomena pasca-materialisme (*post materialism*) yang berargumen bahwa fenomena ini tidak bisa lepas dari adanya kecenderungan perubahan dalam

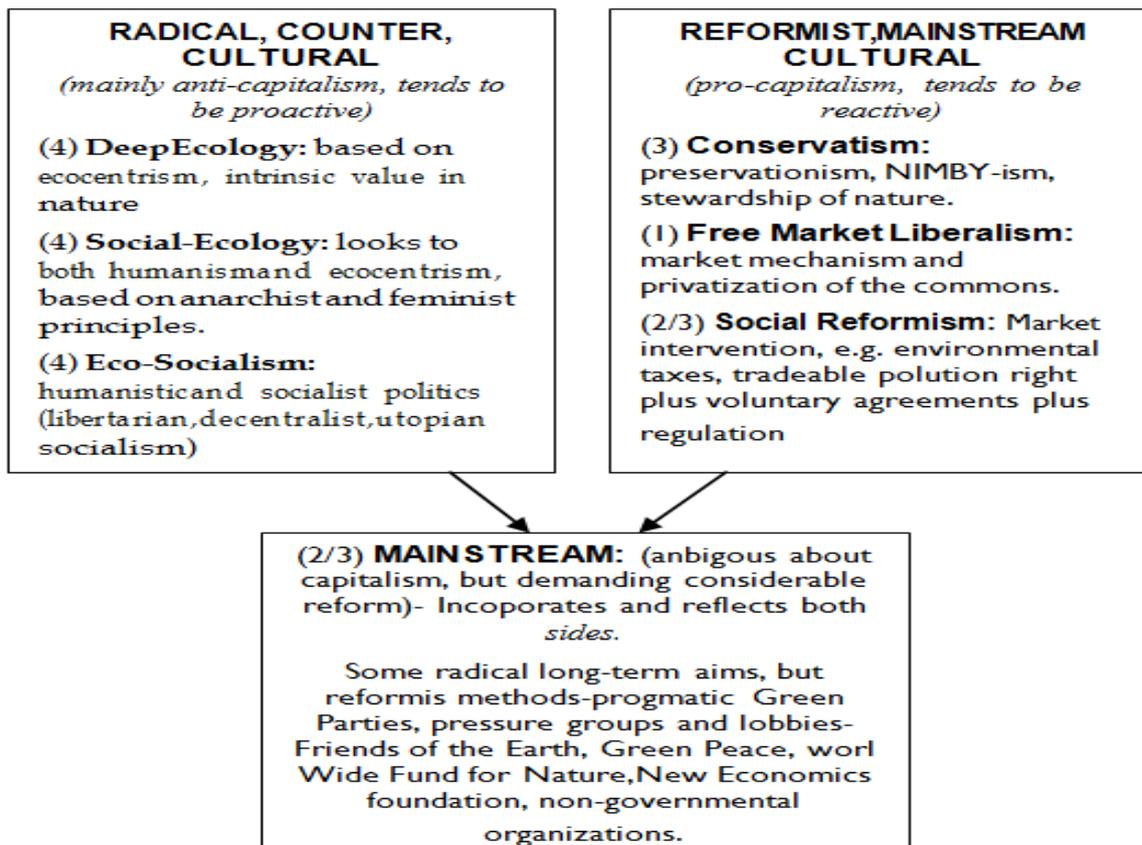
masyarakat paska industri. Pada titik itu, terjadi pergeseran dari “nilai-nilai kelangkaan” ke nilai-nilai “pascamaterialis”, dan sekaligus perubahan distribusi nilai-nilai yang tidak sesuai dengan jalur-jalur kelas seperti dikotomi kiri-kanan.

Dengan mengumpulkan materi survei dari serangkain negara industri, Inglehart menunjukkan bahwa nilai-nilai pencapaian dan pertumbuhan ekonomi memudar seiring meningkatnya kemakmuran, sehingga masyarakat memperlihatkan lebih besarnya sensitivitas mereka akan isu kualitas hidup, yang menyangkut seperti lingkungan, nilai-nilai kebebasan berekspresi dan partisipasi.

Lebih lanjut, Politik Hijau merupakan isu baru dalam kamus politik kontemporer. Perkembangan gerakan politik ini tidak

Menurut (Tim Hayward, 2005) perkembangan teori Politik Hijau (*Green political theory*) diambil dari fakta bahwa manusia merupakan bagian dari alam, sehingga yang memiliki implikasi bagi perilaku politiknya. Dengan argumen ini, teori politik juga harus selaras dengan teori-teori lingkungan. Artinya, manusia tidak hanya dilihat sebagai individu yang rasional (seperti dalam pandangan liberalisme) atau sebagai makhluk sosial (seperti pandangan sosialisisme) akan tetapi sebagai *natural beings*, dan lebih jauh sebagai *political animals*.

Sedangkan menurut (Mathew Patterson, 2000) perlu untuk membedakan antara green politics dan environmentalism. Environmentalis menerima kerangka kerja yang eksis dalam realitas politik, sosial, ekonomi,



hanya muncul dan berkembang dalam fora politik nasional, tetapi sudah ikut berkembang dalam tingkat regional bahkan global (politik internasional).

serta struktur normatif yang ada dalam dunia politik. Gerakan ini mencoba memperbaiki masalah lingkungan dengan struktur yang sudah ada. Sementara itu,

Politik Hijau menganggap bahwa struktur-struktur yang sudah ada tersebut justru menjadi dasar utama munculnya krisis lingkungan. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa struktur ekonomi-sosial-politik memerlukan perubahan dan perhatian yang lebih utama.

Gambar diatas memperlihatkan perbedaan antara pola gerakan lingkungan hidup yang di dasarkan pada ideologi politik maupun ideologi ekonomi. Gerakan lingkungan hidup ini dibedakan antara gerakan lingkungan radikal dan gerakan lingkungan reformis.

Kelompok reformis berangkat dari pandangan umum ideologi budaya liberalisme, demokrasi (seperti dipraktikkan oleh Partai Buruh dan Partai Sosial Demokrat), dan sosialisme. Melalui pendekatan ini, mereka mencoba memperbaiki sistem kapitalisme menjadi lebih baik, sebagai reaksi terhadap permasalahan lingkungan. Kelompok ini mengadopsi perspektif yang dikenal dengan teknosentris. Paham teknosentrisme meyakini bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan manajemen ekosistem yang rasional adalah jalan penyelesaian bagi permasalahan lingkungan.

Secara lebih jauh, kelompok ini mempertanyakan keterlibatan negara dalam ekonomi pasar. Ide pasar bebas tidak akan mengurangi pengelompokan kekuatan pasar, sehingga meningkatnya kepemilikan individu terhadap lingkungan akan mempengaruhi kondisi objektif lingkungan itu sendiri. Untuk itu kelompok ini merekomendasikan solusi peningkatan pajak lingkungan (*eco-taxes*), insentif, regulasi perusahaan-perusahaan dan kepemilikan individu.

Berangkat dari pandangan yang sama, kelompok konservatif menawarkan proteksi dengan konsep pemeliharaan

lingkungan, seperti tertuang dalam program lingkungan Uni Eropa yang dikenal dengan 'prinsip pencegahan'. Mereka menolak kemungkinan pembangunan menghasilkan ketidakpastian terhadap kondisi lingkungan. Konservatif tradisional bersikap sama, dan memanasikan sikap mereka dalam sindrom 'Not In My Back Yard' yang mencoba menyerahkan permasalahan polusi dan kerusakan lingkungan kepada komunitas dan negara. Di titik ini, negara dituntut untuk secara luas berperan dalam pengaturan-pengaturan sosial.

Bertolak belakang dengan aliran reformis, gerakan lingkungan radikal justru lebih proaktif, melihat permasalahan lingkungan pada akhirnya, lebih dari sekedar reaksi sederhana terhadap kerusakan yang disebabkan oleh kapitalisme global. Untuk itu, mereka berpandangan bahwa diperlukan perubahan sosial yang fundamental, yang salah satunya adalah eliminasi, atau agenda rekonstruksi kapitalisme. Sehingga, perdebatan tentang lingkungan bergeser dari pendekatan kultural-ekonomis menjadi politis-struktural yang sering digambarkan dalam tradisi perlawanan akar-rumput seperti romantisme, anarkisme, sosialisme utopis dan lain sebagainya.

Pendekatan ini mencakup:

1. *Social Ecology*, secara garis besar didasarkan pada prinsip anarkis yang terutama di interpretasikan dalam kerja Murray Bookchin (e.g. 1990).
2. *Eco-socialism*, bersifat libertarian, desentralistis dan komunalis dalam prinsipnya, berangkat dari pemikiran sosialisme yang pada akhirnya di hadapkan pada negara.
3. *Deep Ecology*, memfokuskan pada perubahan yang fundamental dalam

sikap dan nilai terhadap alam. Mengajak masyarakat dimanapun untuk menyesuaikan diri dengan prinsip ekologi.

Di samping itu, ada beberapa pandangan berbeda dalam mendefinisikan karakter dari Politik Hijau. (R. Eckersley, 2004) memberikan karakteristik Politik Hijau dalam kerangka Ekosentrisme, yang menolak pandangan anthropocentric bahwa nilai moral berpusat pada manusia. Pandangan ini setuju untuk menempatkan kebebasan nilai pada ekosistem dan seluruh aspek kehidupan.

Sementara itu (R. E Goddin, 1992) juga menempatkan etika pada pusat dari posisi politik Hijau. Ia menyatakan bahwa *Green Theory of Value* merupakan pusat dari teori hijau, dengan mengedepankan sumber nilai sebagai fakta dari sesuatu yang dibentuk oleh proses alamiah sejarah, dan lebih daripada sekedar peran manusia.

Lain lagi dengan (John Barry, 2014) dia melihat bahwa Politik Hijau di dasarkan pada tiga prinsip utama, antara lain:

1. Sebuah teori distribusi (intergenerasional) keadilan
2. Sebuah komitmen terhadap proses demokratisasi, dan
3. Usaha untuk mencapai keberlanjutan ekologi

Tiga prinsip utama ini merupakan konsepsi yang mewakili makna dari pusat Politik Hijau. Prinsip ini digunakan sebagai sarana untuk menjelaskan konsepsi dari teori hijau, seperti dalam memahami kelanjutan dari ekotoritarianisme yang menjadi salah satu usaha keberlanjutan bagi biaya demokrasi dan keadilan sosial.

Politik Hijau atau gerakan ekologi sendiri memiliki sepuluh nilai yang menjadi dasar dan tujuan gerakan dan

sekaligus sebagai acuan bagi artikulasi kebijakan politik. Beberapa prinsip ini pada diadopsi secara langsung oleh berbagai partai hijau di dunia seperti Die Grunen di Jerman, dan Green Party of USA:21 mengungkapkan bahwa:

1. Kesadaran dan keberlanjutan Ekologi

Isu ini merupakan isu paling utama, yang menghubungkan tradisi pencerahan dengan pengalaman batasan industrialism sebagai sebuah kompleksitas kesadaran baru yang diambil dari prinsip-prinsip ekologi. Isu ini berangkat dari asumsi bahwa manusia harus bertindak berdasarkan pemahaman bahwa ia merupakan bagian dari alam dan bukan berada di atas alam lingkungannya. Untuk itu, manusia perlu menjaga keseimbangan ekologi dan hidup dalam keterbatasan sumber daya serta batas-batas ekologi planet bumi.

2. Demokrasi Akar Rumput

Dalam hal demokrasi, kaum ekologi percaya bahwa demokrasi yang sebaik-baiknya harus dipraktikkan di tingkat akar rumput. Artinya, di tingkat masyarakat lokal dan bukan di lembaga perwakilan nasional maupun daerah. Menurut mereka, setiap manusia berhak berpendapat terhadap keputusan yang ikut berpengaruh terhadap hidup mereka. Pun manusia tidak boleh menjadi korban dari keinginan segelintir orang saja. Demokrasi diartikan sebagai interfase antara kebebasan berekspresi pada satu pihak dan penghargaan yang sama di pihak lain.

3. Keadilan sosial dan Persamaan Kesempatan

Semua orang memiliki hak dan kesempatan yang sama dari sumber daya yang berasal dari masyarakat dan

lingkungannya. Untuk itu, perlu dihilangkan hambatan-hambatan sosial, seperti rasisme, seksualisme dan heteroseksualisme, pertikaian antar kelas, homophobia, serta penelantaran kepentingan orang tua dan orang cacat. Sikap yang memberikan perlakuan yang sama ini harus mendapat perlindungan undang-undang negara.

4. Anti kekerasan

Menyangkut pluralitas manusia, penting untuk dikembangkan alternatif yang efektif terhadap kebiasaan masyarakat kini dalam menggunakan kekerasan. Untuk itu, pandangan ini memperjuangkan proses demiliterisasi dan penghilangan senjata destruktif masal di dalam negerinya sendiri, tanpa berniat naïf terhadap niat buruk negara lain. Kendati, pandangan ini juga mengakui bahwa tindakan mempertahankan diri dari orang-orang yang berada situasi terdesak adalah sah. Maka dari itu, perlu diupayakan penyelesaian konflik secara non kekerasan. Kelompok ekologi berniat guna mewujudkan suatu kedamaian personal, komunitas, dan global yang abadi.

5. Desentralisasi

Berangkat dari asumsi bahwa sentralisasi kesejahteraan dan kekuasaan berkontribusi besar terhadap ketidakadilan ekonomi, kerusakan lingkungan, dan militerisasi, politik hijau mendukung upaya restrukturisasi institusi-institusi politik, sosial dan ekonomi yang dikuasai oleh segelintir orang kuat (oligarki). Institusi tersebut akan diubah dengan sistem yang lebih demokratis dengan postur birokrasi yang ramping. Pengambilan kepu-

tusan harus sebisa mungkin berada pada tingkat individu dan lokal.

6. Ekonomi Berbasis Komunikasi dan Berkeadilan

Pandangan politik hijau memandang penting untuk menerapkan suatu sistem ekonomi yang berkelanjutan, yang bisa menciptakan lapangan kerja baru dan standard hidup yang baik untuk semua orang tanpa mengabaikan keseimbangan ekologis. Sistem ekonomi tersebut harus bisa memberikan sebuah kebanggaan terhadap pekerjaan yang 'berarti', sehingga bisa membiayai hidup secara berkeadilan sesuai dengan apa yang dikerjakan. Dalam hal ini mereka sangat membela jenis-jenis pekerjaan termarginalkan, tetapi sebenarnya sangat penting dalam menopang harmoni hidup dalam masyarakat. Sebagai, pekerjaan domestik dan pekerjaan menjaga kebersihan yang selama ini kurang dihargai. Ini perlu diarusutamakan dalam perspektif politik hijau.

7. Feminisme dan Kesetaraan Gender

Kaum ekologi menyadari sepenuhnya bahwa manusia mewarisi sistem sosial yang berdasarkan pada dominasi patriarki, baik dalam wilayah dan etika dominasi dan kontrol dengan cara berinteraksi lebih kooperatif. Artinya, perbedaan pendapat dan gender dihormati. Maka dari itu, nilai-nilai kemanusiaan seperti persamaan jenis kelamin, tanggung jawab interpersonal dan kejujuran harus dikembangkan dengan kesadaran moral. Manusia perlu mengingat bahwa proses yang menentukan keputusan dan tindakan sama pentingnya dengan usaha penyelesaian dari apa yang diinginkan.

8. Penghormatan Terhadap Keberagaman

Adanya keyakinan akan pentingnya keberagaman budaya, etnis, ras, agama dan kepercayaan spiritual mengimplikasikan promosi atas hubungan yang saling menghargai diantara keberbedaan tadi. Berangkat dari keyakinan ini, mereka percaya bahwa perbedaan-perbedaan yang ada harus pula tercermin dalam organisasi-organisasi dan badan-badan pengambilan keputusan. Karenanya, pandangan politik hijau sangat mendukung kemunculan pemimpin dari kalangan mereka yang selama ini terpinggirkan dari peran kepemimpinan, misalnya kaum perempuan.

9. Tanggung Jawab Personal dan Global

Kaum ekologi mendukung tindakan individu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, akan tetapi tindakan tersebut tidak boleh mengabaikan keseimbangan ekologi dan harmoni sosial. Karenanya mereka mau bergabung dengan orang-orang dan organisasi yang mau memperjuangkan perdamaian abadi, keadilan sosial ekonomi, dan menjaga kelestarian bumi.

10. Fokus pada masa depan dan keberlanjutan

Tindakan dan kebijakan kaum ekologi dimotivasi oleh tujuan jangka panjang. Mereka berjuang dalam perlindungan sumber daya alam yang berharga, mengamankan peraturan atau tidak melakukan semua pemborosan. Dengan mengembangkan sistem ekonomi berkelanjutan (*sustainable development*) yang tidak mengantungkan diri pada ekspansi untuk mampu bertahan hidup. Mereka pandangan yang mempunyai

tujuan keuntungan jangka pendek atau berorientasi profit, tanpa memperhatikan dampak lingkungan. Caranya, dengan menjaga agar perkembangan ekonomi, penggunaan teknologi baru dan kebijakan fiskal ikut bertanggung jawab terhadap generasi mendatang yang akan mewarisi hasil dari tindakan saat ini.

PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Yayat Hidayat, 2017) dengan judul “Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Rumah Tangga Petani (Studi Kasus Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka)” Sekolah Pascasarjana Institute Pertanian Bogor tahun 2017 menyatakan bahwa alih fungsi lahan atau konversi lahan merupakan suatu proses yang dinamis dan selalu akan terjadi mengikuti perkembangan penduduk maupun pola pembangunan wilayah.

Pada daerah perkotaan (urban) maupun daerah penyangga kota (suburban) konversi lahan mengikuti pola pembangunan yang menitikberatkan kepada penggunaan lahan yang memiliki nilai ekonomi tinggi seperti pabrik, pusat perbelanjaan, perumahan dan lainnya. Namun untuk daerah perdesaan (*rural*) dengan pola pembangunan yang menitikberatkan pada sektor pertanian, justru kerap terjadi konversi lahan pertanian khususnya lahan sawah. Konversi terhadap lahan sawah ini justru lebih sering terjadi dibandingkan dengan lahan pertanian lainnya karena lahan sawah terutama yang produktif atau subur biasanya terletak di daerah yang strategis.

Sumber daya lahan pertanian memberikan manfaat yang sangat luas secara ekonomi, sosial dan lingkungan. Oleh karena itu hilangnya lahan pertanian

akibat dikonversi ke penggunaan non pertanian akan menimbulkan dampak negatif terhadap berbagai aspek. Dari aspek ekonomi, konversi lahan pertanian menjadi kawasan Bandara Internasional Kertajati berkaitan dengan adanya perubahan pendapatan rumah tangga petani, perubahan produksi padi, dan berkurangnya kesempatan kerja di sektor pertanian.

Adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi Bandara Internasional Kertajati sangat berpengaruh terhadap berkurangnya kesempatan kerja pertanian. Hal tersebut berkaitan dengan mata pencaharian sebagai petani dan buruh tani yang aktivitasnya memerlukan curahan tenaga kerja dalam kegiatan usaha taninya. Mengacu pada penelitian (Sumaryanto, 2001) kerugian akibat konversi lahan sawah berupa hilangnya kesempatan kapasitas untuk memproduksi padi antara 4,5 - 12,5 ton/ ha/tahun dan hilangnya kesempatan petani memperoleh pendapatan sebesar Rp 2,3 juta dan kelompok buruh tani sebesar Rp 900.000 /musim.

Alih fungsi lahan pertanian menyebabkan perubahan pada aspek kesempatan kerja. Pada awalnya mayoritas masyarakat sekitar lahan yang terkonversi memiliki mata pencaharian bertani. Sedangkan setelah adanya alih fungsi lahan mata pencaharian penduduk menjadi lebih beragam, yaitu selain bertani dan berdagang ada juga yang menjadi sopir, Satgas Bandara Internasional Kertajati, usaha rental mobil, ataupun menjadi peternak.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Wangke, 2011) yang menunjukkan adanya diversifikasi usaha oleh petani setelah terjadinya alih fungsi lahan menjadi PLTP. Bertani oleh sebagian besar masyarakat di Kertajati yang

lahannya terkonversi masih tetap dipertahankan, karena bagi mereka selain tidak ada pilihan pekerjaan lain juga karena tidak ada keahlian untuk bekerja di luar pertanian. Bertani adalah bagian hidup mereka karena sudah bertahun-tahun dan secara turun temurun mereka tekuni dengan mengolah lahannya sendiri atau sistem sewa.

Selain itu, alih fungsi lahan pertanian menyebabkan terjadinya perubahan luas lahan garapan usaha tani masyarakat. Hal tersebut berdampak pada hilangnya pendapatan usahatani padi yang biasa didapatkan setiap tahunnya. Nilai rata-rata hilangnya pendapatan rumah tangga petani padi sebesar Rp 38.598.962,-/ha/tahun. Usaha tani padi sawah di Kertajati memberikan keuntungan bagi rumah tangga petani, hal tersebut dapat dilihat dari nilai R/C rasionya 2,82. Selain itu, perubahan luas lahan usahatani dapat menyebabkan padi yang biasanya bisa dikonsumsi sendiri juga berkurang, sehingga mempengaruhi cadangan pangan mereka.

Hal ini dapat menimbulkan kerentanan pada ekonomi rumah tangga karena selain pendapatan berkurang, mereka juga tidak dapat memenuhi kebutuhan pangannya dari hasil lahannya sendiri, sehingga harus mengeluarkan biaya tambahan. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian (Hidayati, 2013) yang menyatakan bahwa dampak konversi lahan pertanian terhadap kondisi sosial ekonomi petani antara lain berkurangnya hasil sawah, penurunan pendapatan petani, berkurangnya peluang kerja dalam pertanian, perubahan mata pencaharian dan sulitnya akses petani terhadap lahan.

Identifikasi dampak negatif alih fungsi lahan pertanian menjadi Bandara Internasional Kertajati dari aspek lingkungan di antaranya terkait dengan

ketersediaan air untuk lahan pertanian dan kebisingan. Lahan pertanian yang berbatasan langsung dengan lokasi Bandara Internasional Kertajati mengalami kendala terkait terganggunya saluran air dan sumber air. Alih fungsi lahan pertanian menjadi Bandara Internasional Kertajati mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan, sehingga dampak terhadap polusi udara dan kualitas untuk pertanian lebih buruk. Adanya kebisingan merupakan dampak negatif yang paling dirasakan masyarakat yang tinggal dekat dengan Bandara Internasional Kertajati.

Dampak Pembangunan Bandara Internasional Kertajati Dalam Kajian *Green Political Theory*

Pada daerah perkotaan (urban) maupun daerah penyangga kota (suburban) konversi lahan mengikuti pola pembangunan yang menitikberatkan kepada penggunaan lahan yang memiliki nilai ekonomi tinggi seperti pabrik, pusat perbelanjaan, perumahan dan lainnya. Namun untuk daerah perdesaan (*rural*) dengan pola pembangunan yang menitikberatkan pada sektor pertanian, justru kerap terjadi konversi lahan pertanian khususnya lahan sawah.

Sumber daya lahan pertanian memberikan manfaat yang sangat luas secara ekonomi, sosial dan lingkungan. Dari aspek ekonomi, konversi lahan pertanian menjadi kawasan Bandara Internasional Kertajati berkaitan dengan adanya perubahan pendapatan rumah tangga petani, perubahan produksi padi, dan berkurangnya kesempatan kerja di sektor pertanian.

Alih fungsi lahan pertanian menyebabkan perubahan pada aspek kesempatan kerja. Selain itu, alih fungsi lahan pertanian menyebabkan terjadinya perubahan luas lahan garapan usaha tani

masyarakat. Hal tersebut berdampak pada hilangnya pendapatan usahatani padi yang biasa didapatkan setiap tahunnya. Hal ini dapat menimbulkan kerentanan pada ekonomi rumah tangga karena selain pendapatan berkurang, mereka juga tidak dapat memenuhi kebutuhan pangannya dari hasil lahannya sendiri, sehingga harus mengeluarkan biaya tambahan.

Identifikasi dampak negatif alih fungsi lahan pertanian menjadi Bandara Internasional Kertajati dari aspek lingkungan di antaranya terkait dengan ketersediaan air untuk lahan pertanian dan kebisingan. Lahan pertanian yang berbatasan langsung dengan lokasi Bandara Internasional Kertajati mengalami kendala terkait terganggunya saluran air dan sumber air. Alih fungsi lahan pertanian menjadi Bandara Internasional Kertajati mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan, sehingga dampak terhadap polusi udara dan kualitas untuk pertanian lebih buruk. Adanya kebisingan merupakan dampak negatif yang paling dirasakan masyarakat yang tinggal dekat dengan Bandara Internasional Kertajati.

Secara sederhana dapat dianalisis bahwa pembangunan Bandara Internasional Kertajati harus memperhatikan pemikiran John Barry, dia melihat bahwa Politik Hijau di dasarkan pada tiga prinsip utama, antara lain: sebuah teori distribusi (intergenerasional) keadilan, sebuah komitmen terhadap proses demokratisasi, dan usaha untuk mencapai keberlangsungan ekologi.

Dalam pembangunan Bandara Internasional Kertajati, negara dalam memberikan kesempatan kepada warga negara secara kolektif untuk berpartisipasi dalam proses-proses pembuatan kebijakan publik baik bersifat ekosentrisme maupun antroposentrisme (eko-demokrasi). Jangan

sampai pembangunan Bandara Internasional Kertajati menimbulkan bencana alam, perubahan iklim, polusi udara, dan kehancuran lingkungan. Pembangunan Bandara Internasional Kertajati tidak boleh bersifat ekosentrisme saja, dimana lingkungan alam dimanfaatkan secara maksimal hingga mengakibatkan krisis.

Masyarakat dan peradaban bisa bertahan hidup jika dibangun diatas prinsip-prinsip ekologi. Prinsip-prinsip itu antara lain: kesadaran dan keberlangsungan ekologi, demokrasi akar rumput, keadilan sosial dan persamaan kesempatan, anti kekerasan, desentralisasi, ekonomi berbasis komunikasi dan berkeadilan, feminisme dan kesetaraan gender, penghormatan terhadap keberagaman, tanggung jawab personal dan global, serta fokus pada masa depan dan keberlanjutan.

Dampak pembangunan Bandara Internasional Kertajati yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan harus diminimalisasi dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Sebab partisipasi masyarakat sebagai bagian dari demokrasi dan upaya bersama untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan tanpa merusak alam, mengakibatkan krisis, dan mampu dinikmati oleh anak cucu pada massa yang akan datang.

KESIMPULAN

Sumber daya lahan pertanian memberikan manfaat yang sangat luas secara ekonomi, sosial dan lingkungan. Identifikasi dampak negatif alih fungsi lahan pertanian menjadi Bandara Internasional Kertajati dari aspek lingkungan di antaranya terkait dengan ketersediaan air untuk lahan pertanian dan kebisingan. Lahan pertanian yang berbatasan langsung dengan lokasi

Bandara Internasional Kertajati mengalami kendala terkait terganggunya saluran air dan sumber air.

Alih fungsi lahan pertanian menjadi Bandara Internasional Kertajati mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan, sehingga dampak terhadap polusi udara dan kualitas untuk pertanian lebih buruk. Adanya kebisingan merupakan dampak negatif yang paling dirasakan masyarakat yang tinggal dekat dengan Bandara Internasional Kertajati.

Dalam pembangunan Bandara Internasional Kertajati, negara dalam memberikan kesempatan kepada warga neraga secara kolektif untuk berpartisipasi dalam proses-proses pembuatan kebijakan publik baik bersifat ekosentrisme maupun antroposentrisme (eko-demokrasi). Jangan sampai pembangunan Bandara Internasional Kertajati menimbulkan bencana alam, perubahan iklim, polusi udara, dan kehancuran lingkungan. Pembangunan Bandara Internasional Kertajati tidak boleh bersifat ekosentrisme saja, dimana lingkungan alam dimanfaatkan secara maksimal hingga mengakibatkan krisis.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriwan. (2011). *Teori Hijau: Alternatif dalam Perkembangan Teori Hubungan Internasional*. Padang: Universitas Andalas. *Multiversa Journal of International Studies* Vol 2 No. 1 2011.
- Barry, J. (2014). *Green Political Theory*. In V. Geoghegan, & R. Wilford (Eds.), *Political Ideologies: An Introduction (4 ed., pp. 153-178)*. London: Routledge.
- Eckersley, R. (2004). *The Green State: Rethinking Democracy and Sovereignty*. Cambridge MA: MIT Press.

- Frankland, E. Gene & Donal Schoomaker. (1992). *Between Protest and Power: The Green Party in Germany*. Oxford: Westview Press.
- Goodin, R E. (1992). *Green Political Theory*. Cambridge: Polity Press.
- Hayward, T. (2005). *Constitutional Environmental Rights*. Oxford: Oxford University Press.
- Hidayat, Yayat. (2017). *Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Rumah Tangga Petani (Studi Kasus Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka)*. Bogor: Sekolah Pascasarjana Institute Pertanian Bogor.
- Hidayati HN, Rilus A. Kinseng. (2013). *Konversi Lahan Pertanian dan Sikap Petani di Desa Cihideung Ilir Kabupaten Bogor*. Sodaliti : Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 01, No. 03. 2013. Fakultas Ekologi Manusia Institute Pertanian Bogor.
- Inglehart R. (1977). *The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles Among Western Publics*. Princeton: Princeton University Press.
- Maulidya, Sari. (2018). *Pembangunan Bandar Udara Internasional Jawa Barat dalam Perspektif Sustainable Development*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Patterson, Mathew. (2000). *Understanding Global Environmental Politics: Domination, Accumulation, Resistance*. London: Palgrave.
- Pepper, David. (2002). *Environmentalism, dalam Gary Brownig, etc ed), Understanding Contemporary Society (theories end The Present)*. London: SAGE Publication.
- Sumaryanto, Friyatno S, Irawan B. (2001). *Konversi Lahan Sawah ke Penggunaan Nonpertanian dan Dampak Negatifnya. Prosiding Seminar Nasional Multifungsi Lahan Sawah*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat, Bogor.
- Wangke, W.M. (2011). *Dampak Sosial Ekonomi Kegiatan Pembangunan Proyek Lapangan Uap dan PLTP di Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur*. Jurnal Agri Sosioekonomi, Vol. 7 No. 1 2011.